

# STRATEGI KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MISKIN PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

## *STRATEGY OF ECONOMIC RESILIENCE OF POOR FAMILIES WHO RECEIVE SOCIAL ASSISTANCE FUNDS IN TANAH TINGGI CENTRAL JAKARTA*

**Lutfi Amalia dan Palupi Lindiasari Samputra**

Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

Jl. Salemba Raya No 4, Jakarta Pusat, Indonesia

**E-mail:** Lutfiamaliaadel@gmail.com

Diterima: 28 Juli 2019, Direvisi: 17 Maret 2020; Disetujui: 14 April 2020

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tempat tinggal, pendapatan per kapita, pembiayaan pendidikan, jaminan keluarga, aset dan liabilities terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Metode penelitian dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, dengan alat analisis regresi logistik. Data terdiri dari 100 sampel rumah tangga miskin di wilayah Kelurahan Tanah Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pendapatan per kapita dan jaminan keluarga terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Sedangkan kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilities secara bersamaan, dan pembiayaan pendidikan anak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Pendapatan per kapita makin tinggi meningkatkan peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 27,257 kali dibanding keluarga miskin yang berpendapatan per kapita rendah. Namun, ketergantungan terhadap jaminan keluarga yang bersumber sebagian besar dari bantuan pemerintah berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi keluarga miskin sebesar 0,420 kali dibanding keluarga miskin yang tidak bergantung pada jaminan keluarga yang bersumber dari pemerintah. Strategi menabung secara periodik, meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan kualitas hidup dan meningkatkan sumber penghasilan dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin. Penyuluhan dan kampanye tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga menjadi sangat penting untuk disosialisasikan kepada keluarga miskin agar mereka terus mengingat dan berusaha meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan ekonomi keluarga.

**Kata Kunci:** *strategi, ketahanan ekonomi, keluarga miskin.*

### **Abstract**

*This study aims to examine the influence of housing, per capita income, education funding, family security, assets and liabilities to the chances of poor families having strong economic resilience. The research method with the quantitative method uses a questionnaire as an instrument of data collection, with a logistic regression analysis tool. Data consists of 100 samples of poor households in the Tanah Tinggi Village area. The results of the study show that there is an influence of residence, per capita income and education funding on the opportunities of poor families that have strong economic resilience. While assets and liabilities and family guarantees do not have a strong influence on the economic resilience of poor families. Per capita income and education funding have the highest contribution to the chances of poor families having strong economic resilience, each at 42,823 times and 9,278 times. The strategy of saving periodically, increasing income, optimizing and reducing quality of life and increasing sources of income can help strengthen the economic resilience of poor families. Counseling and campaigns on family economic resilience strategies are very important to be socialized to poor families so that they continue to remember and try to improve the quality of life and family economic security.*

**Keywords:** *strategy, economic resilience, poor families.*

## PENDAHULUAN

Keluarga miskin merupakan keluarga yang memiliki penghasilan rendah, tidak memiliki pekerjaan tetap, pendidikan yang masih rendah bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak dapat memenuhi standar gizi minimal (Rejekiingsih, 2011). Keluarga miskin juga merupakan keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena keterbatasan sumber daya. Pemerintah mengkategorikan keluarga miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) (Cahyat A. , 2004). Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2018, standar Garis Kemiskinan (GK) bagi keluarga miskin yaitu memiliki nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori/kapita/hari. Selain itu, Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2018 mengatakan bahwa pendapatan minimum yang harus dimiliki oleh keluarga Indonesia berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) nasional pada Maret 2018 adalah Rp401.220/kapita/bulan. Garis Kemiskinan (GK) nasional sebesar Rp401.220/kapita/bulan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yaitu Rp294.806/kapita/bulan ditambah dengan Garis Kemiskinan non makanan (GKNM) yaitu Rp106.414/kapita/bulan. Oleh karena itu, keluarga miskin yang memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4,59 orang memerlukan pengeluaran agar dapat hidup layak sebesar Rp1,84 juta/keluarga miskin/bulan. Jika pengeluaran rumah tangga kurang dari Rp1,84 juta/keluarga miskin/bulan, maka keluarga tersebut termasuk dalam kategori keluarga miskin (Badan Pusat Statistik, 2018).

Garis kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) ternyata bersifat relatif dan akan terus mengalami peningkatan (Cahyat A. , 2007). Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Karena garis kemiskinan sejak bulan Maret 2015-Maret 2018 telah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,27% setiap semester. Oleh karena itu, pemerintah mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan.

Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa salah satu wilayah yang mengalami penurunan angka kemiskinan adalah wilayah Jakarta Pusat. Jika sebelumnya angka kemiskinan di wilayah Jakarta Pusat meningkat dari 33,62 ribu penduduk pada tahun 2013 menjadi 37,65 ribu penduduk pada tahun 2014 dan terus meningkat menjadi 38,01 ribu penduduk pada tahun 2015. Kini mengalami penurunan menjadi 35,82 ribu penduduk pada tahun 2016 dan terus mengalami penurunan menjadi 34,83 ribu penduduk pada tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2018).

Ternyata penurunan angka kemiskinan yang diumumkan pemerintah, bukan hanya disebabkan oleh peningkatan Garis Kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan. Namun juga disebabkan oleh faktor lain yang salah satunya merupakan adanya pemerintah dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial (bansos) bagi masyarakat miskin yang sangat berlebihan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Saat dilaksanakannya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2018, ternyata ada penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang terhitung naik signifikan hampir sebesar 87,6% pada akhir bulan Maret 2018. Penyaluran dana Bantuan Sosial (bansos) meningkat sangat signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu pada

tahun 2017 dan 2018. Anggaran dana bantuan sosial (bansos) pada tahun 2017 meningkat sebanyak 11,46% atau sebesar Rp55,3 Triliun dan pada tahun 2018 meningkat sebanyak 41,42% atau sebesar Rp78.2 Triliun. Karena sebelumnya anggaran dana bantuan sosial pada tahun 2016 menurun sebanyak 48,93% atau sebesar Rp49,61 triliun dari anggaran dana bantuan sosial pada tahun 2015 sebanyak Rp97.15 triliun. Oleh karena itu, jika anggaran dana bantuan sosial (bansos) dikurangi, maka jumlah penduduk miskin dikhawatirkan akan kembali mengalami peningkatan.

Kekhawatiran tentang adanya peningkatan kemiskinan kembali jika dana bantuan sosial dikurangi dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor yang pertama karena kebijakan pemerintah untuk memberikan dana bantuan sosial (bansos) belum sepenuhnya efektif menjadi solusi perentas kemiskinan. Karena secara psikologis keluarga yang diberikan dana bantuan sosial kemungkinan akan memiliki rasa ketergantungan terhadap dana tersebut dan dikhawatirkan tidak mau bekerja mencari nafkah tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Faktor yang kedua adalah kebijakan untuk menaikkan standar Garis Kemiskinan (GK) bagi keluarga miskin bukan merupakan solusi yang tepat, karena bagi keluarga miskin yang sudah mencoba bertahan dan mencoba keluar dari garis kemiskinan berdasarkan standar Garis Kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan pada semester sebelumnya dapat tidak mampu bertahan mengikuti standar Garis Kemiskinan (GK) yang terbaru. Sehingga keluarga miskin yang sudah keluar dari Garis Kemiskinan (GK) maupun bagi yang sedang mencoba bertahan dan keluar dari Garis Kemiskinan (GK) menjadi kembali miskin dan tentunya dapat menaikkan angka kemiskinan kembali.

Faktor yang ketiga yaitu karena adanya kesalahan strategi pengelolaan pendapatan yang dimiliki oleh keluarga miskin karena adanya gejolak ekonomi yang mampu meningkatkan daya beli keluarga. Peningkatan daya beli keluarga menyebabkan kesalahan strategi dalam hal pengelolaan pendapatan yang dimiliki oleh keluarga miskin. Hal tersebut dapat mengakibatkan kondisi keluarga yang terus menerus akan merasa miskin, serba kekurangan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga. Sehingga strategi pengelolaan pendapatan bagi keluarga miskin diperlukan agar keluarga miskin dapat memiliki ketahanan dalam aspek ekonomi. Karena strategi menurut Rangkuti merupakan perencanaan utama yang menjelaskan sebuah institusi untuk mencapai tujuan berdasarkan misi yang telah direncanakan sebelumnya (Rangkuti, 2013).

Samputra mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak memiliki dampak langsung secara signifikan terhadap upaya menurunkan kemiskinan perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menentukan upaya pengetasan kemiskinan. Jika sebuah keluarga ingin memiliki hidup layak dan tidak kekurangan, diperlukan instrumen lain berupa dana bantuan sosial dan strategi dalam mengelola pendapatan yang dimiliki oleh keluarga dengan baik guna mencapai ketahanan dalam aspek ekonomi (Samputra & Munandar, 2019). Ketahanan ekonomi keluarga menurut Doriza dapat didefinisikan sebagai kemampuan keluarga dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan pembelian barang dan jasa serta kebutuhan uang yang diperlukan dalam keluarga (Doriza, 2015). Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pola pengelolaan, menganalisis pengaruh tempat tinggal, pendapatan perkapita, aset dan liabilities, pembiayaan pendidikan

anak, dan jaminan keluarga terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat.

### **Keluarga Miskin**

Keluarga miskin didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga guna meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dari aspek keuangan dan aspek-aspek lainnya. Badan Pusat Statistik mendefinisikan keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan serta memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2018). World Bank (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan (deprivation of well being). Karakteristik keluarga miskin yaitu 1) memiliki pendapatan yang masih rendah; 2) tidak memiliki pekerjaan tetap; 3) pendidikan yang rendah bahkan tidak berpendidikan; 4) tidak memiliki tempat tinggal; dan 5) tidak dapat memenuhi standar gizi minimal (Rejekiingsih, 2011). Sementara itu, kemiskinan menurut Spicker juga diartikan berdasarkan tiga kategori konsep yaitu miskin karena tidak memiliki sesuatu yang mereka butuhkan, miskin karena memiliki pendapatan yang rendah dan miskin karena masuk kedalam keadaan sosial yang miskin (Cahyawan & Machdum, 2019). Menurut Chambers kemiskinan juga terbagi kedalam 4 bentuk, yaitu (1) kemiskinan absolut bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar termasuk sandang, pangan dan papan; (2) kemiskinan relatif jika kondisi miskin dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; (3) kemiskinan kultural yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha, malas, pemboros dan tidak kreatif meskipun mendapatkan bantuan dari pihak lain; dan (4) kemiskinan struktural yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya pada sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi menambah tingkat kemiskinan (Habibullah, 2019).

### **Faktor Penyebab Keluarga Miskin**

Kemiskinan dalam keluarga didasari oleh kurangnya pendapatan yang dimiliki oleh keluargasehinggatidakmampuuntukmencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Terdapat dua faktor utama penyebab keluarga miskin yaitu 1) tingkat pendapatan nasional yang fluktuatif dan 2) adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan (Todaro & Smith, 2006). Ahli lain mengatakan bahwa faktor penyebab keluarga miskin adalah 1) keterbatasan sumber daya alam (SDA); 2) rendahnya tingkat pendidikan anggota keluarga; dan 3) rendahnya kesehatan yang dapat menghambat produktivitas keluarga (Amar, 2012).

### **Ukuran Kemiskinan keluarga**

Ukuran kemiskinan keluarga menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ditentukan oleh Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) pada bulan Maret 2018 berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) yaitu minimum Rp401.220/kapita/bulan pendapatan yang harus dimiliki oleh keluarga. Garis Kemiskinan sebesar Rp401.220/kapita/bulan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp294.806/kapita/bulan dan Garis Kemiskinan non makanan (GKNM) yaitu Rp106.414/kapita/bulan. Hal tersebut menyebabkan keluarga miskin yang memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4,59 orang memerlukan pengeluaran agar dapat hidup layak sebesar Rp1,84 juta/

keluarga miskin/bulan. Jika pengeluaran rumah tangga kurang dari Rp1,84 juta/keluarga miskin/bulan, maka keluarga tersebut termasuk dalam kategori keluarga miskin (Badan Pusat Statistik, 2018).

### **Ketahanan Nasional**

Ketahanan nasional adalah konsep untuk mempertahankan keteraturan, kekuatan, kondisi dinamis dan kestabilan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari segala aspek yang dapat berpotensi terjadinya perubahan. Ketahanan nasional juga dapat didefinisikan sebagai kekuatan suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan dan ancaman (Usman, 2003). Pendapat lain mengatakan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi bermacam tantangan, hambatan dan ancaman guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (Suradinata, 2005).

### **Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga**

Keberhasilan tujuan dalam hidup membutuhkan strategi untuk menjalankan visi dan misi kehidupan sesuai dengan yang telah direncanakan. Strategi merupakan cara untuk mencapai sebuah tujuan yang perlu dicapai. Menurut Tjiptono, strategi merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu (Tjiptono, 2006). Strategi juga merupakan rangkaian rencana untuk pengambilan keputusan dan tindakan pengelolaan guna menentukan keberhasilan pada suatu institusi dalam jangka panjang yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan cara dengan cara perencanaan jangka panjang, implementasi, evaluasi dan pengendalian (Purnomo, 1996).

Ketahanan berasal dari bahasa latin yaitu “*Resilire*” yang berarti melompat kembali

berkaitan dengan kemampuan pemulihan seseorang dengan cepat dari efek sumber masalah yang dialami. Ketahanan ekonomi keluarga merupakan sebuah kondisi dan kemampuan yang memungkinkan keluarga untuk pulih dan bangkit dari sumber masalah dalam aspek ekonomi (Briguglio, 2006). Ketahanan ekonomi bukan hanya tentang bagaimana keluarga mampu bertahan dari masalah keterpurukan dalam bidang ekonomi, namun juga tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga (Center of Local Economic Strategis, 2016). Ketahanan ekonomi keluarga menurut Bank of International Settlements (BIS) merupakan kemampuan keluarga dalam bidang ekonomi untuk cepat pulih dari goncangan dan masalah yang merugikan dan mengandung dampak ketidakseimbangan dalam keuangan (Bank of International Settlements (BIS), 2016).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi ketahanan ekonomi keluarga adalah suatu rencana untuk pengambilan keputusan keluarga dalam bertahan dan menciptakan kondisi baru saat terjadi krisis ekonomi melalui observasi lingkungan, perencanaan jangka panjang berdasarkan sumber daya yang dimiliki, implementasi, evaluasi dan pengendalian guna mencapai keberhasilan tujuan untuk hidup layak dan mandiri.

### **Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga**

Ketahanan ekonomi keluarga dapat terlihat jika suatu keluarga dapat memenuhi syarat berdasarkan indikator ketahanan ekonomi keluarga yang telah ditentukan (Hasanah & Mariastuti, 2015). Indikator ketahanan ekonomi keluarga juga dapat menjadi acuan bagi keluarga untuk dapat hidup layak, mandiri dan tahan terhadap ancaman serta krisis ekonomi. Indikator ketahanan keluarga menurut

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki empat dimensi yaitu 1) ketersediaan tempat tinggal keluarga; 2) memiliki pendapatan perkapita perbulan keluarga; 3) pembiayaan pendidikan anak yang tercukupi; dan 4) memiliki jaminan keuangan keluarga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016). Sedangkan *Departement of Family and Community Services Australia* mengatakan bahwa indikator ketahanan ekonomi keluarga adalah asset dan liabilities (Departement of Family and Community Services, 2000).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan kuisioner. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan alat analisis kuantitatif deskriptif. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah *Statistical Package for The Sciences (SPSS)* (Ghazali, 2011). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sample penelitian. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Jumlah populasi KK di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat adalah 14.102 KK dari total 14 RW. Sehingga peneliti memberikan asumsi bahwa tiap RW memiliki jumlah bobot yang sama yaitu sebanyak 1007 KK per RW. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini berdasarkan jumlah 100 sampel yang terdiri dari masing-masing 25 sampel dari RW 08, RW 11 dan RW 12. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui observasi dan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terhadap buku, jurnal, dan artikel maupun dengan cara menelaah dokumen-

dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian dan relevan dengan penelitian (Bungin, 2005).

Pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan independen. Variabel independen pada penelitian ini adalah tempat tinggal, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, jaminan keluarga, aset dan liabilities. Variabel dependen pada penelitian ini adalah peluang ketahanan ekonomi keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan menggunakan *Statistical Package for The Sciences (SPSS)* untuk uji regresi logistik. Dalam metode regresi logistik, maka akan diukur dengan kategori 1 = responden tergolong memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, jika memenuhi minimal tiga dari variabel independen (tempat tinggal, pendapatan perkapita, aset dan liabilities, jaminan keluarga dan pembiayaan pendidikan) dan 0 = responden tergolong memiliki ketahanan ekonomi yang tidak kuat, jika responden hanya memenuhi dua atau salah satu dari variabel independen (tempat tinggal, pendapatan perkapita, aset dan liabilities, jaminan keluarga dan pembiayaan pendidikan) (Cholilawati & Hasanah, 2015).

Persamaan regresi logistik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5$$

Ket:

y = probability terjadinya kejadian (1) dan sebaliknya (0)

1 = keluarga miskin yang memiliki ketahanan ekonomi tinggi atau kuat

0 = keluarga miskin yang memiliki ketahanan ekonomi yang tidak kuat

X<sub>1</sub> = Tempat Tinggal

(1 = memiliki rumah sewa atau memiliki rumah milik sendiri namun tidak memiliki

biaya perawatan rumah; 2= memiliki rumah sewa atau rumah milik sendiri namun memiliki biaya perawatan rumah 1000-10.000/bulan; 3= memiliki rumah milik sendiri namun memiliki biaya perawatan rumah 11000-20.000/bulan; 4= memiliki rumah milik sendiri dan memiliki biaya perawatan rumah >20.000/bulan)

X<sub>2</sub>=Pendapatan Perkapita (1 = pengeluaran perbulan memiliki selisih >50% dari jumlah pendapatan perbulan atau GK; 2 = pengeluaran perbulan memiliki selisih <50% dari pendapatan atau GK); 3 = antara pendapatan dan pengeluaran memiliki jumlah yang sama dengan jumlah GK; 4 = pendapatan jika dikurang pengeluaran perbulan memiliki sisa > GK)

X<sub>3</sub>= Aset dan Liabilities (1 = hutang perbulan memiliki selisih >50% dari aset atau pendapatan perbulan; 2 = hutang perbulan memiliki selisih <50% dari aset atau pendapatan); 3 = antara hutang dan aset memiliki jumlah yang sama; 4 = aset jika dikurang hutang perbulan memiliki nilai > dari pendapatan)

X<sub>4</sub>= Pembiayaan Pendidikan Anak  
(1 = hanya mendapatkan bantuan biaya sekolah; 2= mendapatkan bantuan biaya sekolah dan perlengkapan sekolah anak; 3= mendapatkan bantuan biaya sekolah, perlengkapan sekolah anak, dan mampu memenuhi uang transport sekolah anak; 4= mendapatkan bantuan biaya sekolah, perlengkapan sekolah anak, mampu memenuhi uang transport sekolah anak, mendapatkan beasiswa, mampu memenuhi les tambahan untuk anak)

X<sub>5</sub>=Jaminan Keluarga (1= tidak memiliki tabungan dan tidak memiliki jaminan kesehatan; 2 = tidak memiliki tabungan namun memiliki jaminan kesehatan gratis dari pemerintah; 3= memiliki tabungan Rp10.000-100.000/bulan namun memiliki jaminan kesehatan gratis dari pemerintah

atau tidak memiliki tabungan namun mampu membayar iuran jaminan kesehatan; 4= memiliki tabungan >Rp100.000/bulan dan mampu membayar iuran jaminan kesehatan)

Data variable independen dengan skala ordinal diubah menjadi skala interval dengan metode MSI (Method of Succesive Interval). Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis regresi logistic. Langkah pertama dilakukan uji kecocokan model (*Goodness of Fit*) untuk menguji keselarasan antara model dengan nilai observasinya, dengan *Hosmer and Lemeshow Test*. Hipotesis dalam pengujian ini adalah :

H0 : Model sesuai dengan nilai observasinya

H1 : Model tidak sesuai dengan nilai observasinya

Model regresi dapat diterima jika berhasil menerima Ho dan dapat dilanjutkan pada tahap uji parameter serentak (*Omnibus Tests of Model Coefficients*), selanjutnya tahap uji parameter parsial (*Uji-Wald*) dan interpretasi nilai koefisien regresi dengan *Odds Ratio (Exp(B))*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pola Pengelolaan Ekonomi Keluarga Miskin Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat**

Pola pengelolaan ekonomi keluarga pada keluarga miskin di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat sangat bervariasi. Sebanyak 28% dari total 100 responden mengatakan bahwa pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sisanya sebanyak 25% dari total 100 responden mengatakan bahwa pendapatan mereka sedang, 25% dari total 100 responden mengatakan bahwa pendapatan mereka kurang cukup dan sebanyak 22% dari total 100 responden mengatakan bahwa pendapatan mereka tidak cukup. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu

faktornya karena sebanyak 65% dari total 100 responden memiliki pendapatan perkapita kurang dari 3 juta perbulan. Sisanya sebanyak 35% dari total 100 responden memiliki pendapatan lebih dari 3 juta perbulan. Sebagian besar responden pada penelitian ini juga tidak memiliki rumah milik sendiri. Sebanyak 93% dari total 100 responden menyewa rumah sedangkan sisanya sebanyak 3% memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar responden perlu mengeluarkan uang lebih tidak hanya untuk perawatan rumah, namun juga untuk menyewa rumah.

Sebagian responden pada penelitian ini atau sebesar 55% dari total 100 responden mengeluarkan uang sebanyak Rp50.000 untuk biaya perawatan rumah. Sisanya sebanyak 24% mengeluarkan uang >Rp150.000; sebanyak 15% mengeluarkan uang mulai dari Rp51.000 sampai Rp100.000 dan sebanyak 6% mengeluarkan uang mulai dari Rp100.000 sampai Rp150.000. Responden pada penelitian ini juga sebagian besar tidak berhutang. Karena sebanyak 76% dari total 100 responden tidak memiliki hutang. Sisanya sebanyak 34% dari total 100 responden memiliki hutang mulai dari Rp300.000 sampai >Rp900.000.

Sebagian besar responden yang memiliki hutang, jenis kebutuhan yang mereka hutangi adalah aset berupa barang elektronik. Karena menurut mereka, memiliki aset adalah hal yang paling penting. Jika sewaktu-waktu mereka sedang berada pada keadaan yang sulit, mereka bisa menjualnya terlebih dahulu sebelum meminta pada kerabat dekat maupun berhutang pada pihak lainnya. Oleh karena itu, sebanyak 61% dari total 100 responden memiliki nilai nominal total aset >3 juta rupiah. Sisanya sebanyak 39% dari total responden memiliki nilai nominal total aset < 3 juta rupiah. Responden pada penelitian ini sebanyak 84%

juga memiliki nilai stress finansial yang sedikit yaitu 0-0,1 karena sebagian besar responden memiliki aset yang lebih besar jika dibandingkan dengan memiliki hutang. Namun, responden pada penelitian ini sebanyak 92% dari total 100 responden tidak memiliki tabungan uang tunai. Mereka belum memiliki pemikiran bahwa menabung adalah hal yang paling penting jika sewaktu-waktu membutuhkan uang dalam keadaan sulit. Mereka merasa belum memiliki kecukupan uang untuk disisihkan atau untuk menabung. Karena mereka merasa lebih baik menghabiskan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar responden pada penelitian ini juga memiliki jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan yang layak. Mereka memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan dari pemerintah berupa jaminan BPJS Kesehatan atau KIS. Sehingga responden pada penelitian ini tidak merasa khawatir jika sewaktu-waktu sakit dan ingin berobat maupun terhadap biaya pendidikan anak.

### Uji Kecocokan Model

Nilai uji kecocokan model menggunakan uji Hosmer and Lemeshow, yang bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian model dengan nilai observasinya. Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian kesesuaian model.

**Tabel 1.** Uji Hosmer and Lemeshow Test

Model Regresi	Chi-Square	df	Sig.	Ket
$P(Y)=f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$	16,300	8	0,038	Tolak Ho (Model tidak sesuai nilai observasi)
$P(Y)=f(X_1 * X_3, X_2, X_4, X_5)$	12,164	8	0,144	Terima Ho (Model sesuai nilai observasi)

Sumber : output spss

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa model regresi logistik yang tepat digunakan untuk menjelaskan model ketahanan ekonomi keluarga miskin adalah model kedua yaitu :  $P(Y) = f(X1 \cdot X3, X2, X4, X5)$  dengan nilai signifikansi 0,144 yang berarti model sesuai nilai observasi.

Terdapat interaksi antara variabel X1 (tempat tinggal) dan X3 (Aset dan Liabilitas) sebagai modifikasi perbaikan model.

### Analisis Regresi Logistik Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin

#### Uji Parameter Serentak

Pengujian parameter serentak bertujuan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil pengujian parameter serentak mengikuti *Omnibus Tests of Model Coefficients* pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Hasil Uji *Omnibus Tests of Model Coefficients*

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	77.482	4	.000
	Block	77.482	4	.000
	Model	77.482	4	.000

Sumber : output SPSS

Nilai uji signifikansi diatas menunjukkan  $0,000 < .$ , artinya tolak  $H_0$ . Terdapat minimal satu variabel independen (X) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Sehingga dapat disimpulkan model dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

#### Uji Parameter Parsial

Untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji-wald. Hasil

output koefisien regresi masing-masing variabel independen ditunjukkan pada Tabel 3.

Koefisien variable Pendapatan perkapita (X2) memiliki nilai P-value uji wald sebesar  $0,00 < .$  Artinya terdapat pengaruh signifikan dan positif antara pendapatan perkapita terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Variabel jaminan keluarga (X5) secara statistik juga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai P-value sebesar  $0,042 < .$

**Tabel 3.** Uji *Wald* dan *Odd Ratio*

Variables in the Equation							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	X2	3.305	.668	24.483	1	.000	27.257
	X4	.015	.372	.002	1	.968	1.015
	X5	-.867	.426	4.139	1	.042	.420
	X1X3	.144	.108	1.773	1	.183	1.155
	Constant	-8.570	2.210	15.044	1	.000	.000

a. Variable(s) entered on step 1: X2, X4, X5, X1X3.

Sumber : output SPSS

Variabel pembiayaan pendidikan anak, dan tempat tinggal dengan kepemilikan aset dan liabilities berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Berdasarkan Tabel di atas maka diperoleh Persamaan logistik ketahanan ekonomi keluarga miskin =  $-8.570x - 0.144X_1 X_3 + 3.305X_2 + 0.015 X_4 - 0.867X_5$

Nilai konstanta -8,570 dapat diartikan bahwa peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat adalah tidak ada (sangat kecil) tanpa memiliki tempat tinggal, pendapatan perkapita, aset dan liabilitas, pembiayaan pendidikan anak dan jaminan keluarga.

## 1. Analisis Pengaruh Kepemilikan Tempat Tinggal dengan Aset dan liabilitas Terhadap Peluang Keluarga Miskin Memiliki Ketahanan Ekonomi Kuat

Persamaan regresi logistik, koefisien regresi variabel kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilitas ( $X_1 * X_3$ ) adalah sebesar 0,144 dengan tingkat signifikansi (nilai P value Uji wald (sig) sebesar  $0,968 > = 0,05$ ). Artinya kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilitas secara bersamaan memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Odd ratio berdasarkan nilai koefisien  $\text{Exp}(B)$  pada tabel 3 untuk kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilitas adalah sebesar 1,155. Karena koefisien B bertanda positif, maka dapat di tafsirkan peluang keluarga miskin yang memiliki tempat tinggal dengan aset dan liabilitas memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 1,155 kali dibanding keluarga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dengan aset dan liabilitas. Namun pengaruh variable tersebut tidak cukup signifikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Hal ini dikarenakan untuk memiliki rumah sendiri sekaligus kepemilikan aset dan liabilitas dibutuhkan uang yang besar, sehingga bagi responden yang memiliki penghasilan kecil akan sulit memiliki tempat tinggal sekaligus aset dan liabilitas dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Akan lebih realistis finansial yang dimiliki dialokasikan bagi keluarga miskin untuk menyewa rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal ini aset yang dimiliki keluarga miskin pada penelitian ini berupa barang elektronik. Keluarga miskin pada penelitian ini juga memiliki aset berupa

barang elektronik dengan cara mencicil. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 92% keluarga miskin yang memiliki cicilan hutang barang elektronik tidak berarti lebih memiliki ketahanan ekonomi yang tidak kuat karena memiliki hutang dan stress finansial yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga miskin yang memiliki aset sedikit dan tidak memiliki hutang untuk membeli aset. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa utang dalam konsumsi rumah tangga memiliki dampak negatif dan membuat ketahanan ekonomi sebuah keluarga menjadi tidak kuat. Menurut (Herispon, 2017) keluarga yang memiliki hutang akan memiliki tingkat stress yang tinggi, terperangkap dalam pelunasan hutang, menanggung beban hutang sehingga dekat dengan kemiskinan. Jika ia tidak mampu melunasi hutang, penindasan dan kucilan dari masyarakat akan ia dapatkan karena dianggap hina tidak mampu membayar hutang.

## 2. Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Peluang Keluarga Miskin Memiliki Ketahanan Ekonomi Kuat

Persamaan regresi logistik, koefisien regresi variabel pendapatan perkapita ( $X_2$ ) adalah sebesar 3.305 dengan tingkat signifikansi (nilai P value Uji wald (sig) sebesar  $0,000 < = 0,05$ ). Artinya pendapatan perkapita memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Odd ratio berdasarkan nilai koefisien  $\text{Exp}(B)$  pada tabel 3 untuk pendapatan perkapita adalah sebesar 27,257. Karena koefisien B bertanda positif, maka dapat di tafsirkan peluang keluarga miskin yang memiliki pendapatan perkapita memiliki

ketahanan ekonomi kuat sebesar 27,257 kali dibanding keluarga miskin yang tidak memiliki pendapatan perkapita. Pengaruh variable tersebut cukup signifikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Hal ini dikarenakan pendapatan merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tanpa adanya pendapatan yang cukup, maka keluarga miskin memiliki kecenderungan ketahanan

Berdasarkan data pada penelitian ini diketahui bahwa jumlah keluarga miskin yang pendapatan perkapita dalam jangka waktu satu bulan dengan nominal sebanyak 0-1 juta rupiah berjumlah 18 keluarga, nominal sebanyak 1,1-2 juta rupiah berjumlah 25 keluarga, nominal 2,1-3 juta rupiah berjumlah 22 keluarga, dan nominal lebih dari 3 juta rupiah berjumlah 35 keluarga. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadillah bahwa pendapatan perkapita keluarga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan serta ketahanan ekonomi keluarga (Fadillah & Dewi, 2016). Fadillah mengatakan jika pendapatan perkapita keluarga meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan menurun (Fadillah & Dewi, 2016). Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi suatu tanda bahwa peningkatan pendapatan perkapita keluarga menjadikan ketahanan ekonomi keluarga menjadi kuat.

### **3. Analisis Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Anak Terhadap Peluang Keluarga Miskin Memiliki Ketahanan Ekonomi Kuat**

Persamaan regresi logistik, koefisien regresi variabel pembiayaan pendidikan anak (X4) adalah sebesar 0.015 dengan tingkat signifikansi (nilai P value Uji wald (sig) sebesar  $0,968 > = 0,05$ ). Artinya

pembiayaan pendidikan anak memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Odd ratio berdasarkan nilai koefisien  $\text{Exp}(B)$  pada tabel 3 untuk pembiayaan pendidikan anak adalah sebesar 1,015. Karena koefisien B bertanda positif, maka dapat di tafsirkan peluang keluarga miskin yang memiliki pembiayaan pendidikan memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 1,015 kali dibanding keluarga miskin yang tidak memiliki pembiayaan pendidikan anak. Namun pengaruh variable tersebut tidak cukup signifikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil data penelitian diketahui 97% dari total 100% memiliki jaminan pendidikan dari pemerintah untuk anak maka responden memiliki kemampuan pembiayaan pendidikan anak yang lainnya selain untuk iuran bulanan sekolah yang telah dijamin gratis dari pemerintah. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa sebanyak 57,7% dengan total presentase 104 keluarga memanfaatkan fasilitas dari pemerintah berupa pembiayaan pendidikan anak yang gratis dalam wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk efisiensi pendapatan keluarga (Aini, Ifa, & Sukamti, 2018). Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan jumlah pendapatan perkapita perbulan yang dimiliki keluarga. Keterbatasan kemampuan pendapatan perkapita keluarga mempengaruhi keluarga untuk merasa cukup terhadap fasilitas pembiayaan pendidikan anak yang gratis. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan anak memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap peluang ketahanan ekonomi keluarga.

#### 4. Analisis Pengaruh Jaminan Keluarga Terhadap Peluang Keluarga Miskin Memiliki Ketahanan Ekonomi Kuat

Persamaan regresi logistik, koefisien regresi variabel jaminan keluarga (X5) adalah sebesar -0,867 dengan tingkat signifikansi (nilai P value Uji wald (sig) sebesar  $0,042 < = 0,05$ ). Artinya pembiayaan pendidikan anak memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Odd ratio berdasarkan nilai koefisien  $\text{Exp}(B)$  pada tabel 3 untuk pembiayaan pendidikan anak adalah sebesar 0,420. Karena koefisien B bertanda positif, maka dapat di tafsirkan peluang keluarga miskin yang memiliki pembiayaan pendidikan memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 0,420 kali dibanding keluarga miskin yang tidak memiliki pembiayaan pendidikan anak. Pengaruh variable tersebut cukup signifikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Hal ini dikarenakan responden yang memiliki jaminan keluarga sedikit dan mendapatkan jaminan keluarga berupa jaminan kesehatan dari pemerintah dengan kelas paling rendah memiliki ketergantungan hanya kepada pemerintah saja. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian bahwa sebanyak 100% responden mendapatkan bpjs kesehatan dari pemerintah. Sedangkan responden yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan gratis pada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 97% dan sisanya sebesar 3% tidak mendapatkan KJP. Sehingga sewaktu-waktu pemerintah mengurangi atau membatasi akses jaminan tersebut, maka akan berdampak buruk terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Jika mereka memiliki pendapatan yang tinggi dan bisa memiliki jaminan keluarga yang tinggi serta

tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah maka jaminan keluarga yang mereka miliki menjadi jauh lebih baik dan lebih banyak. Hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin yang bersumber dari kemampuan ekonominya sendiri. Setiyono juga mengatakan bahwa di Indonesia biaya pelayanan kesehatan semakin mahal dan kemampuan pemerintah dalam menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga sangat terbatas (Setiyono, 2018). Sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari sistem pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan serta perlindungan sosial yang cukup bagi keluarga. Pemberian motivasi terhadap keluarga juga diperlukan agar keluarga bisa terus berusaha kerja keras untuk menaikkan standar kualitas hidup melalui edukasi kebijakan tentang minimal standar hidup di Indonesia dan pelatihan ketrampilan kerja.

#### Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin

Strategi merupakan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa ketahanan ekonomi keluarga merupakan cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki keluarga agar dapat hidup mandiri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016). Selain itu ketahanan ekonomi keluarga juga merupakan kemampuan keluarga dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan pembelian barang dan jasa serta kebutuhan uang yang diperlukan dalam keluarga (Doriza, 2015).

Dengan demikian, strategi ketahanan ekonomi keluarga meliputi cara untuk mengatasi

masalah ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan menyeimbangkan pendapatan serta pengeluaran yang terkait dengan pembelian barang maupun jasa agar dapat hidup mandiri.

Strategi pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga miskin adalah menabung secara periodik. Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada penelitian ini diketahui bahwa hanya 15 responden dari total 100 responden atau hanya sebanyak 15% dari total 100 responden yang memiliki tabungan. Menabung adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Karena menabung dengan cara menyisihkan uang dari penghasilan secara periodik, jumlahnya dapat diakumulasikan. Sehingga tabungan yang dimiliki dapat meringankan beban seseorang jika sewaktu-waktu membutuhkan uang tambahan untuk keperluan tertentu.

Selain itu menabung tidak harus berupa uang yang di simpan, namun juga bisa berupa aset berupa barang-barang elektronik maupun non elektronik. Aset berupa barang-barang elektronik bisa berupa TV, Mesin Cuci, Handphone, DVD, dsb. Sedangkan aset barang-barang non elektronik seperti perhiasan, kendaraan bermotor, rumah dsb. Menabung berupa aset berupa barang non elektronik tentunya memiliki nilai jual lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai jual aset berupa barang elektronik. Sehingga menabung dengan membeli aset barang non elektronik seperti perhiasan, kendaraan bermotor, rumah dsb lebih disarankan agar nilai jual yang lebih tinggi.

Menabung dengan cara lainnya juga bisa dilakukan dengan cara mengikuti arisan yang dilakukan secara periodik dalam suatu kelompok tertentu. Mengumpulkan uang pada periode tertentu dalam satu kelompok juga bisa membantu untuk menyisihkan uang secara

periodik. Sehingga uang yang telah dikumpulkan dalam satu kelompok bisa diakumulasikan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu jika seseorang sudah mendapat jadwal/giliran untuk mendapatkan uang yang telah dikumpulkan secara periodik.

Strategi kedua yang dapat dilakukan oleh keluarga miskin untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga adalah dengan cara memiliki pola penghasilan ganda yaitu suami-istri masing-masing memiliki pekerjaan (*dual-earner*) maupun suami atau istri memiliki dua pekerjaan sehingga memiliki dua sumber penghasilan pada waktu yang bersamaan (memiliki pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama). Sumber penghasilan ganda yang didapatkan dari suami-istri yang masing-masing bekerja maupun dari suami atau istri yang memiliki dua pekerjaan dalam waktu bersamaan jika diakumulasi memiliki jumlah penghasilan yang lebih besar. Sehingga mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini, jumlah responden yang memiliki pekerjaan sampingan adalah sebanyak 43 responden dari total 100 responden atau sebesar 43% responden. Sisanya sebanyak 57 responden atau sebesar 57% responden dari total 100 responden tidak memiliki pekerjaan sampingan. Sehingga penyuluhan atau edukasi strategi ketahanan ekonomi keluarga dengan cara menyarankan memiliki pekerjaan sampingan sangat dan menyarankan suami-istri memiliki pekerjaan penting untuk dilakukan.

Masalah dan kesulitan yang akan timbul pada istri tidak bekerja karena memiliki anak usia sekolah dapat diatasi dengan cara memanfaatkan potensi atau keahlian yang dimiliki oleh yang bersangkutan yang bisa terjangkau baik fisik maupun modal. Misalnya adalah seorang istri memiliki potensi atau keahlian memasak dalam keluarga, maka seorang istri bisa memulai

berjualan lauk-pauk matang, atau berjualan snack yang dimasak sendiri serta dijual dirumah agar mendapat keuntungan dari hasil penjualan sembari mengawasi, mendidik dan mengasuh anak dirumah. Sehingga keuntungan yang didapatkan bisa digunakan untuk menambah penghasilan untuk pembiayaan kebutuhan sehari-hari. Namun, jika seorang suami/istri pada akhirnya masih memiliki kesulitan keuangan untuk mendapatkan modal usaha. Hal tersebut tentunya dapat dikonsultasikan kepada kerabat dekat maupun instansi pemerintah yang menyediakan dana pinjaman untuk modal memulai usaha. Bagi suami/istri yang memiliki potensi dapat membuktikan potensi yang ia miliki agar kerabat maupun instansi pemerintah mau dan percaya untuk memberikan modal. Selanjutnya, jaminan peminjaman dan pengembalian modal bisa ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku maupun berupa pembagian hasil keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan.

Strategi ketiga yang dapat dilakukan oleh keluarga miskin untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga adalah dengan cara mencari kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lainnya sebanyak-banyaknya melalui pekerjaan musiman. Meskipun semakin beragam pekerjaan marjinal dari seseorang maka akan menunjukkan status semakin miskin pula kehidupan keluarganya. Namun hal tersebut akan membantu meningkatkan jumlah akumulasi penghasilan yang dimiliki dalam keluarga. Karena dengan memiliki pekerjaan yang beragam dalam satu waktu memiliki sifat saling menambahkan dan menggenapi bukan menggantikan (Cholilawati & Hasanah, 2015). Sehingga keluarga dapat hidup mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada

penelitian ini diketahui sebanyak 68 dari total 100 responden memiliki pasangan (suami/istri) yang juga sama-sama memiliki pekerjaan. Sehingga dalam keluarga memiliki 2 jenis pekerjaan. Selain itu sebanyak 43 dari total 100 responden memiliki pekerjaan sampingan. Sehingga sebanyak 43 responden dari total 100 responden memiliki tiga jenis pekerjaan dalam keluarga. 43 responden yang memiliki pekerjaan sampingan juga memiliki pasangan (suami/istri) yang juga memiliki pekerjaan.

Strategi keempat yang dapat dilakukan oleh keluarga miskin untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga adalah dengan cara mengoptimalkan apa yang dimiliki dan mereduksi kualitas kebutuhan hidup. Hal ini dilakukan dengan cara meminimalisasi variasi makanan serta meminimalisasi dan menahan diri untuk tidak membeli barang maupun hal yang tidak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya tidak membeli pakaian sampai saat-saat penting atau saat dibutuhkan, tidak membeli rokok, tidak membeli atau mencicil aset dsb yang tidak terlalu dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa seluruh responden mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah namun memiliki jumlah banyaknya bantuan yang berbeda-beda yaitu sebanyak 1 responden mendapatkan 1 jenis bantuan, sebanyak 15 responden mendapatkan 2 jenis bantuan, sebanyak 56 responden mendapatkan 3 jenis bantuan, sebanyak 17 responden mendapatkan 4 jenis bantuan dan sisanya sebanyak 11 responden mendapatkan 5 jenis bantuan sosial dari pemerintah. Bagi 84 responden yang mendapatkan bantuan lebih dari 3 jenis bantuan seharusnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan memiliki ketahanan dalam keluarga. Namun berdasarkan hasil data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 12 responden memiliki persepsi

bahwa pendapatannya yang bersumber dari penghasilan pekerjaan dan bantuan sosial dari pemerintah tidak cukup, sebanyak 60 responden memiliki persepsi belum cukup, sebanyak 13 responden memiliki persepsi kurang cukup dan sebanyak 35 responden memiliki persepsi bahwa pendapatannya yang bersumber dari penghasilan pekerjaan dan bantuan sosial dari pemerintah telah cukup. Selain itu sebanyak 33 responden dari total 100 responden memiliki hutang untuk mencicil pembelian aset berupa barang elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini belum memiliki kesadaran untuk meminimalisasi atau mereduksi keinginan membeli barang-barang lainnya yang kurang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, penyuluhan dan kampanye tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga sangat penting untuk disosialisasikan kepada keluarga miskin agar mereka terus mengingat dan berusaha meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan ekonomi keluarga. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Trisnawati & Jatningsih, 2017) penyuluhan dan kampanye rutin tentang strategi ketahanan ekonomi diperlukan oleh keluarga miskin khususnya bagi ibu rumah tangga yang setiap hari memiliki banyak waktu luang akan menumbuhkan kesadaran kritis yang akan menguatkan diri untuk keluar dari segala permasalahan yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi dalam keluarga.

### **Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Sebagai Upaya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS)**

Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) merupakan usaha yang terencana dan melembaga meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-

institusi sosial (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Ciri utama dari Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah komprehensif atau terpadu dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan untuk menempatkan penerima pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosial kulturalnya (Suharto, 2005).

Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) pada hakikatnya memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan penunjang (Hanifah & Unayah, 2011). Fungsi Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) sebagai (1) pencegahan mencakup kegiatan mencegah timbul, meluas, serta kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat. Sedangkan fungsi yang ke (2) Rehabilitasi merupakan proses refungsionalisasi dan pematapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi yang ke (3) Pengembangan, merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penggalan dan pendayagunaan potensi dirinya; dan fungsi yang ke (4) Penunjang, merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Keempat fungsi Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) dimaksud mencakup upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial melalui peningkatan kemampuan, kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk berperan

aktif dalam tata penghidupan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih sejahtera.

Dengan demikian strategi ketahanan ekonomi keluarga keluarga yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam keluarga seperti menabung secara periodik; memiliki pola penghasilan ganda karena suami-istri masing-masing memiliki pekerjaan (*dual-earner*); memiliki pekerjaan musiman untuk menambah penghasilan; dan mengoptimalkan apa yang dimiliki serta mereduksi kualitas kebutuhan hidup dapat menjadi upaya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) karena mewakili pelaksanaan keempat fungsi untuk mencegah kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial, untuk merehabilitasi atau melaksanakan kembali fungsi sosial keluarga, menggali dan mendayaguna potensi diri dalam keluarga untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga sehingga peningkatan kemampuan dan peran aktif keluarga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan sosial keluarganya bisa menjadi penunjang keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS).

## KESIMPULAN

1. Pengelolaan ekonomi keluarga miskin kelurahan Tanah Tinggi memiliki pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sumber pendapatan, tidak memiliki tabungan dan memiliki banyak hutang karena ia banyak mencicil pembelian aset berupa barang elektronik.
2. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pendapatan perkapita dan jaminan keluarga terhadap peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Sedangkan kepemilikan tempat tinggal dengan aset dan liabilities secara bersamaan, dan pembiayaan pendidikan

anak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Pendapatan perkapita makin tinggi meningkatkan peluang keluarga miskin memiliki ketahanan ekonomi kuat sebesar 27,257 kali dibanding keluarga miskin yang berpendapatan perkapita rendah. Namun, ketergantungan terhadap jaminan keluarga yang bersumber sebagian besar dari bantuan pemerintah berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi keluarga miskin sebesar 0,420 kali dibanding keluarga miskin yang tidak bergantung pada jaminan keluarga yang bersumber dari pemerintah.

3. Ketahanan ekonomi keluarga miskin dapat ditingkatkan dengan strategi menabung secara periodik; memiliki pola penghasilan ganda suami-istri masing-masing memiliki pekerjaan (*dual-earner*); memiliki pekerjaan musiman; dan mengoptimalkan apa yang dimiliki dan mereduksi kualitas kebutuhan hidup. Penyuluhan dan kampanye tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga juga menjadi sangat penting untuk disosialisasikan kepada keluarga miskin agar mereka terus mengingat dan berusaha meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan ekonomi keluarga.
4. Strategi ketahanan ekonomi keluarga keluarga yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam keluarga dapat menjadi upaya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) karena mewakili pelaksanaan keempat fungsi untuk mencegah kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial, untuk merehabilitasi atau melaksanakan kembali fungsi sosial keluarga, menggali dan mendayaguna potensi diri dalam keluarga untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga sehingga peningkatan kemampuan dan peran aktif keluarga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan sosial keluarganya bisa menjadi penunjang keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS).

## SARAN

Strategi ketahanan ekonomi keluarga bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial sehingga perlu peran aktif dari pemerintah setempat untuk mendukung dan melakukan kampanye tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga kepada keluarga miskin agar mereka memiliki kesadaran kritis yang akan menguatkan diri untuk keluar dari segala permasalahan kesejahteraan sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Kemenristek Dikti yang telah mendanai penelitian ini. Terima kasih kepada perangkat Kelurahan Tanah Tinggi, Bapak Lurah beserta jajarannya dan seluruh warga Kelurahan Tanah Tinggi yang telah mendukung penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rejekiingsih, T. W. (2011, Juni). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.
- Rangkuti, F. (2013). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Samputra, P. L., & Munandar, A. (2019). Korupsi, Indikator Makro Ekonomi dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal JEKT*, 12(1).
- Doriza, S. (2015). *Ekonomi Keluarga*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Cahyawan, W., & Machdum, S. V. (2019, Januari-April). Pendekatan Institutional dalam Keuangan Mikro dan Perannya Terhadap Pengentasan Kemiskinan: Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Sosio Informa*, 5(1).
- Habibullah. (2019, Januari-April). Inklusi Keuangan dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. *Jurnal Sosio Informa*, 5(1).
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Jakarta Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Amar, S. (2012). *Ekonomi Dalam Perspektif Kelembagaan*. Padang: UNP Press.
- Usman, W. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.
- Suradinata, E. (2005). *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas.
- Tjiptono, F. (2006). *Manajemen Jasa Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.
- Purnomo, S. H. (1996). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Briguglio, L. (2006). Conceptualizing and Measuring Economic Resilience. *Journal of Economics Department University of Malta*.
- Center of Local Economic Strategis. (2016). *Developing Local Economic Resilience: The Role of Local Enterprise Partnership (LEPs)*. Manchester: CLES.
- Bank of International Settlements (BIS). (2016). *Economic Resilience: A Financial Perspective*. Switzerland: BIS.

- Departement of Family and Community Services. (2000). *Indicators of Social and Family Functioning*. Canberra: Australia Government.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cholilawati, & Hasanah, U. (2015). *Ketahanan Keluarga: Sebuah Tantangan di Era Global*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan.
- Herispon. (2017, Juli-Desember). Utang Konsumtif Rumah Tangga dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2).
- Fadillah, N. S., & Dewi, S. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Eko-Regional*, 11(1).
- Aini, E. N., Ifa, & Sukamti, S. (2018, Agustus). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatria Kota Malang. *Technomedia Journal (TMJ)*, 3(1).
- Setiyono, B. (2018, Oktober). Perlunya Revisi Kebijakan Jaminan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
- Trisnawati, N. A., & Jatiningsih, O. (2017). Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(3), 485-500.
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2).
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanifah, A., & Unayah, N. (2011). Kontribusi Organisasi Sosial Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Organisasi Sosial Di Kota Palembang-Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 6(1).
- Banovcinova, A., Levicka, J., & Veres, M. (2014). The Impact of Poverty on The Family System Functioning. *Journal of Procedia - Social Behavioral Sciences*, 132, 148-153.
- Cahyat, A. (2004). *Governance Brief: Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Perhitungan Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: Center For International.
- Cahyat, A. (2007). *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat Indonesia*. Bogor: CIFOR Indonesia.

- Ghazali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, U., & Mariastuti, K. (2015). *Ketahanan Keluarga: Sebuah Tantangan di Era Global*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- kartika, I. N. (2013, Februari). Strategi Pengentas kemiskinan Terhadap Penurunan Rumah Tangga Miskin di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, 18(1).
- Kuncoro, M. (2006). *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Lo, A. Y., Xu, B., Chan, F., & Su, R. (2016). Household Economic Resilience to Catastrophic Rainstorms and Flooding in a Chinese Megacity. *Geographical Research*.
- Mceachern, W. A. (2000). *Makro Ekonomi Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noor, N., & dkk. (2014). Development of Indicators for Family Well-Being in Malaysia. *Journal of Social Indicators research*.
- Oh, S., & Chang, S. J. (2014). Concept Analysis: Family Resilience. *Journal of Nursing*, 4, 980-990.
- Puspitawati, H., & dkk. (2016). *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Timur dan Sumatra Utara (Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor)*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB Bogor.
- Prastyo, A. A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Semarang: UNDIPRESS.
- Rose, A. Z. (2009). Economic Resilience to Disaster. *CREATE Research*, 75.
- Sanderson, T., Carpon, T., & Hertzler, G. (2017). Defining Measuring and Valuing Economic Resilience. *Journal of CSIRO-Data61 Australia*.
- Sumarno, S. (2014, Januari-April). Problema dan Resolusi Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. *Sosio Konsepsia*, 3(2).
- Suryawati. (2005, September). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal JMPK*, 8(3).